

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi intern yaitu meningkatkan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). (Sedarmayanti, 2011 : 260).

Kinerja pemerintah daerah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011 : 34).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitaskannya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayanti, 2014).

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019, Kabupaten Subang Perolehan predikat “B” dalam penilaian tersebut masih terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah terdapat target kinerja yang belum tercapai dengan sempurna, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan 8 indikator kinerja yang memperoleh kategori tidak tercapai dalam bidang : 1. Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapin Kelengkapan Jalan 2. Persen Ketersediaan Rumah Layak Huni 3. Harapan lama sekolah (HLS) 4. Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Nilai Investasi PMDN 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan 8. Indeks Resiko Bencana.

Fenomena lain yaitu 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti piutang Pemkab Subang di pihak ketiga. Masalah ini menjadi catatan BPK terhadap keuangan daerah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Ahmad Sobari mengatakan sehubungan dengan akan diperiksanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang oleh BPK, tercantum dalam laporan tersebut piutang pajak yang menjadi catatan BPK dari tahun ke tahun. Pada tahun sebelumnya, BPK sudah mengingatkan jika piutang tidak ada progres akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah berturut-turut

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian WTP salah satunya dinilai dari kesungguhan upaya pemerintah daerah terhadap persoalan piutang pajak.

<http://www.tintahijau.com/pemerintahan/eksekutif/25867>)

Fenomena lainnya pada tahun 2021 Persoalan sampah yang dihadapi Kabupaten Subang diklaim salah satunya lantaran masa transisi pemindahan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong ke TPA Jalupang. "Pemerintah Kabupaten Subang saat ini sedang berupaya keras agar permasalahan sampah dapat segera teratasi," ujar Bupati Subang, Ruhimat dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/6/2021). lalu, Ruhimat meninjau TPA Jalupang. Penggunaan lahannya baru seluas 4 hektar dari yang direncanakan 14 hektar. Sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai daerah di Subang, termasuk industri. "Sehingga akses jalan belum begitu kondusif serta terjadi penumpukan dalam satu area," kata dia. Ruhimat berharap agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan area TPA sebagai tempat yang produktif sebagai sumber penghasilan. Juga bersama-sama menjaga area TPA jalupang agar aman, tertib dan juga kondusif.

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/02/134937778/masalah-tumpukan-sampah-bupati-subang-kami-upayakan-segera-teratasi?page=all>)

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah subang belum optimal, yang berkaitan dengan hasil (*outcome*), keluaran (*output*) dan Manfaat (*benefit*).

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah diantaranya *Good government governance*. Terdapat pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintah (Claraini (2017), *Good government governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun layanan

publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good government governance* ditingkatkan secara otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi. (Budi Mulyawan dalam Ira Amelia, dkk. 2014)

Keberhasilan kinerja pemerintah daerah juga tidak terlepas dari peran sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan dan akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Pelenyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah, dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pelenyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. (Chici, 2017).

Penilaian kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pemerintah agar hasil kerja lebih baik dari sebelumnya (Tri Putri Lestari (2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Sudiarsana Putra dan I Made Pande Dwiana Putra. Dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, dimensi penelitian dan tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Subang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Government Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Seberapa besar pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara persial
5. Seberapa besar pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Government Governance* pada pemda kab.subang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

3. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara persial.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh *good government governance*, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten subang atau rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang kajian yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang Sistem Akuntansi mengenai *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta memperluas wawasan pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.5. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah daerah kabupaten Subang Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41215 Jawa Barat – Indonesia. Waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan selesai.